Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado

Ferly Christian Kolinug, Anderson G. Kumenaung, Debby Ch. Rotinsulu
Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi
ferlychkolinung@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban terhadap pemerintah daerah. Keadaan ini akan semakin memperkuat tekanan internal dari keuangan daerah, karena peranan sumbangan dan bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah akan semakin kecil. Bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri. Transfer Pemerintah Pusat khususnya yang didominasi oleh transfer tidak bersyarat yaitu DAU dan DBH menjadi sumber dana utama dalam menunjang pembiayaan pembangunan yang ada di Kota Manado, hal ini mengindikasikan adanya fenomena *flypaper effect* pada Kota Manado.

Penelitian ini bertujuan menelaah performa kinerja keuangan daerah untuk mengetahui apakah transfer atau DAU plus DBH dari pemerintah pusat dan PAD berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah (BD) Kota Manado serta untuk mendeteksi terjadinya *flypaper effect*. Data yang dipakai menggunakan data time series dengan periode anggaran tahun 2006-2012. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis rasio dan model ekonometrik, dengan menggunakan data sekunder.

Hasil analisis rasio menunjukkan kemandirian dan derajat desentralisasi memiliki trend positif, akan tetapi masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, juga ditemukan produktivitas dan efektivitas belanja daerah (BD) terjadi penurunan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah maupun serentak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan pengaruh PAD terhadap BD lebih besar daripada pengaruh DAU terhadap BD dan memberikan bukti tentang tidak adanya keberadaan *flypaper effect*. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado dalam memprediksi Belanja Daerahnya (BD) lebih mengutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), *Flypaper Effect.*

ABSTRACT

The implementation of decentralization be financed at the expense of the Regional Budget (APBD) so that development financing will gradually become a burden for local governments. This situation will further strengthen the internal pressure of the financial area, because the role of donations and assistance in financing the regional development center will be smaller. Central assistance in development financing will only be granted to support government spending, particularly for personnel expenditure and development programs to be achieved. This means that over autonomy, transfer of funds given by the central government to local governments began to decrease and become the main source of funding is the revenue from the region itself. Central Government Transfers particularly dominated by unconditional transfer that DAU and DBH become a major source of funding to support the financing of development in the city of Manado, it indicates that the phenomenon of flypaper on the city of Manado.

The research examined the performance of the financial performance area to determine whether the transfer or DAU plus DBH of the central government and the PAD influence on local government

expenditures (BD) as well as the city of Manado for detecting the occurrence of flypaper. The data used using time series data with the 2006-2012 budget period. The analytical method used is the ratio analysis models and econometric models, using secondary data.
Results of the analysis showed the ratio of self-reliance and degree of decentralization has a positive trend, but still highly dependent on the transfer of funds center, also found the productivity and effectiveness of expenditure areas (BD) decline. Regression analysis showed that DAU and PAD separately or simultaneously positive effect on regional expenditures and the effect of PAD to BD is greater than the influence of the DAU to BD and provide evidence about the absence of the existence of flypaper. This indicates that the Local Government Area of Manado in predicting Shopping (BD) prefers his own financial capabilities are a proxy of acceptance revenue (PAD).

Keywords: Financial Performance Regional Budget (APBD), flypaper.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta mendayagunakan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dengan pemerintahan daerah, memperhatikan potensi dan keanekaragaman dari daerah dan memperhatikan adanya peluang dan tantangan persaingan global. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jaya (2002) menyatakan otonomi daerah telah membawa implikasi didalam penyelenggaraan tugas daerah. Pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban terhadap pemerintah daerah. Keadaan ini akan semakin memperkuat tekanan internal dari keuangan daerah, karena peranan sumbangan dan bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah akan semakin kecil. Bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai.

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui pelaksanaan desentralisasi, fungsi pemerintah tertentu dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah didalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini merupakan wujud dari kewenangan dalam bidang keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah itu dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Menurut Suparmoko (2002), dengan semakin mendekatkannya

pemerintahan kepada masyarakat diharapkan pemerintah akan mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibanding bila diformulasikan secara sentralistis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kesiapan dana *(financial)* yang relatif cukup besar, sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai potensi sumber-sumber keuangan daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah menurut Suparmoko (2011) berasal dari enam sumber, - yaitu Pendapatan Asli Darah (PAD), - Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), - Pinjaman Daerah, - Dana Dekonsentrasi, dan - Dana Tugas Pembantuan. Tiga sumber dana yang pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan sumber dana lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Pada umumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Mahmudi, (2010).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang Undang No.33 Tahun 2004).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja daerah merupakan komponen penting yang selalu mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah dan arah pembangunan daerah. Mahmudi, (2010).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan selama periode waktu tertentu biasanya satu tahun yang dituangkan dalam nilai mata uang. Hal ini menggambarkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu program dan rincian kegiatan serta praktek-praktek yang dilaksanakan pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dengan disertai prakiraan biaya yang diperlukan serta pendapatan yang direncanakan untuk membiayainya.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-

masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri. Peran dana transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diusahakan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999) dalam Purnomo (2011).

Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah Kota Manado. Transfer Pemerintah Pusat khususnya yang didominasi oleh transfer tidak bersyarat yaitu DAU dan DBH juga masih nampak berpengaruh dalam pembiayaan pembangunan yang ada di Kota Manado. Hal ini terlihat dari besarnya porsi penerimaan Transfer Tidak Bersyarat yang diperoleh daerah Kota Manado pada tahun 2012 daripada sumber penerimaan lainnya seperti, Transfer Bersyarat, PAD atau Pendapatan Lain-Lain.

Melihat kenyataan bahwa Transfer Tidak Bersyarat (TTB) menjadi sumber dana utama dalam menunjang pembiayaan pembangunan yang ada di Kota Manado, hal ini mengindikasikan adanya fenomena *flypaper effect* nampaknya juga terjadi pada Kota Manado. Pada gambar 1.2 menunjukkan perbandingan perkembangan Transfer Tidak Bersyarat (TTB) dan Belanja Daerah Kota Manado.

Gambar 2
Perbandingan Perkembangan Belanja dan TTB Kota Manado 2006-2012

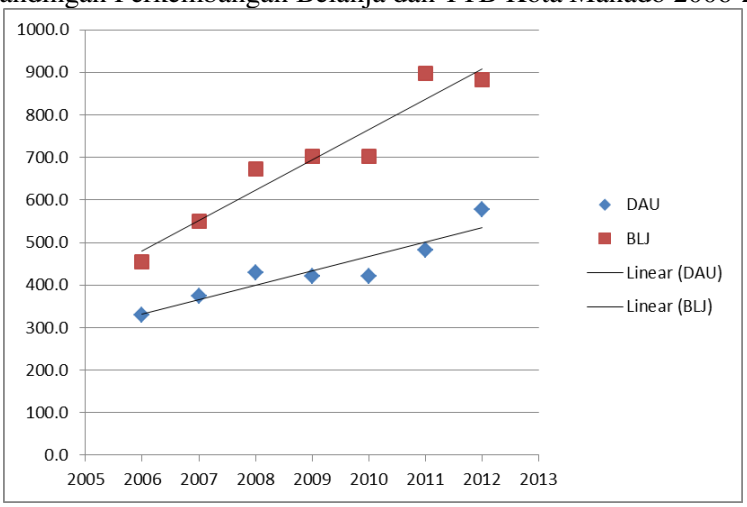

Sumber data : BPS, Provinsi Sulawesi Utara (data diolah)

Gambar 2 menunjukkan bahwa trend slope dari Belanja Daerah (BD) lebih curam daripada trend slope dari Transfer Tidak Bersyarat (TTB) , dimana artinya bahwa peningkatan Belanja Daerah lebih besar dari peningkatan Transfer Tidak Bersyarat. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya gejala *flypaper effect* yang memperlihatkan adanya peningkatan alokasi transfer dengan diikuti oleh pertumbuhan belanja yang lebih tinggi, Purnomo (2011).

Maimunah (2006) menyatakan bahwa *flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer *(grants)* yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD.
Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka sangatlah menarik untuk mengkaji perkembangan performa kemampuan keuangan daerah, dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yang menggambarkan kinerja dan kebijakan anggaran di Kota Manado.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) Kota Manado ?
Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) Kota Manado ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Kota Manado.
Untuk mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* pengaruh DAU dan PAD terhadap pada Belanja Daerah Kota Manado.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

- Bagi para aparat pemerintahan, penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.
- Bagi peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini dapat menjadi referensi dan data tambahan.

LANDASAN TEORI

Teori Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani autos dan nomos. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri, dalam wacana administrasi publik daerah sering disebut sebagai *local self government.* Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi *(high cost economy)* dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu daesentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai maka dari hal ini akan mengakibatkan daerah bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan asas otonomi daerah. Oleh karena itu perlu suatu upaya oleh pemerintah daerah dalam memutus ketergantungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah, Emelia dalam Handayani (2009).

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah yaitu menyangkut kebutuhan dana yang cukup besar, sehingga perlu diatur dan diupayakan perimbangan keuangan secara vertikal antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan *(revenue)* dan atau pembelanjaan *(expenditure)* ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi wewenang (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD), Khusaini dalam Handayani (2009).

Menurut Usui dan Alisjahbana dalam Handayani, (2009), kunci utama dari desentralisasi fiskal adalah pembuatan menjadi lebih dekat dengan masyarakat sehingga distribusi pelayanan publik menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Selanjutnya oleh disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, harus terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Fungsi mengikuti kapasitas *(function should follow capacities)*
   Hal ini berarti pemerintah lokal harus mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang cukup untuk memenuhi fungsi pemerintahan yang telah didelegasikan kepadanya.
b. Pendapatan mengikuti fungsi *(revenues should follow function)*
   Hal ini berarti bahwa di dalam pemerintahan lokal harus tersedia keseimbangan antara tanggung jawab pengeluaran dan instrumen pendapatan

Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti bahwa seiring dengan berjalannya otonomi, dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai berkurang dan yang menjadi sumber utama pembiayaan daerah adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas

(1) dana bagi hasil (DBH),
(2) dana alokasi umum (DAU),
(3) dana alokasi khusus (DAK).

Ketiga macam dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan saling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (PP No.55 Tahun 2005).

Berdasarkan PP No.55 Tahun 2005, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

Teori Transfer

Rosen (2002), membagi jenis grant menjadi 2 macam yaitu *conditonal grant* atau *categorical grant* dan *unconditional grant. Conditional grant* adalah transfer khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan khusus, misalnya untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Jadi *conditional grant* serupa dengan *matching grant. Unconditonal grant* diberikan kepada pemerintah daerah tanpa persyaratan tertentu dan pada umumnya berkaitan dengan usaha-usaha produktif untuk investasi pada badan usaha. Sering juga *uncondional grant* disebut *revenue sharing.* Menurut Azwardi (2007) dalam Purnomo (2011), transfer tidak bersyarat *(unconditional grants)* di Indonesia adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum atau DAU dan Dana Bagi Hasil atau DBH, sedangkan transfer bersyarat *(conditional grants)* berupa Dana Alokasi Khusus atau DAK. Pada dasarnya terdapat dua jenis grant yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu: (1) *block grant* (Dana Alokasi Umum), dan (2) *specific grant* (Dana Alokasi Khusus). Dalam rangka meningkatkan *local discretion, grant* yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat block grant, bukan *specific grant.*

Pendapatan Asli Daerah

Prinsip yang mendasari pendapatan asli daerah adalah melalui desentralisasi fiskal dimana didalamnya terdapat fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankannya. Pemerintah daerah (Pemda) pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga termasuk bagi hasil *(revenue shaing)* dan transfer yang berasal dari pusat.

Sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup., tetapi akibat dari kebutuhan anggaran negara sendiri dalam melaksanakan tugas nasional dan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan, maka sumber pembiayaan yang dapat diserahkan kepada daerah adalah terbatas. Karena setiap daerah diwajibkan menggali segala kemungkinan sumber-sumber keuangan sendiri dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejaan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan (Nawatmi, 2006) .

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal *(fiscal gap)* dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah . Sehingga dana alokasi

umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sementara alokasi dasar dihitung berdasar jumlah pegawai negeri sipil daerah. Proporsi dana alokasi umum antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan tiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan.

Belanja Daerah (BD)

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Flypaper effect

Istilah Flypaper effect diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan *"money sticks where it hits"*. Sejauh ini, belum ada padanan kata *"flypaper effect"* dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan, Purnomo (2011).

Menurut Irham dalam Purnomo (2011), *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer *(unconditional grants)* dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer *(grants)* yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD.

Menurut Dougan dan Kenyon (1988) dalam Dewi (2006) menyebutkan *flypaper effect* merupakan suatu keganjilan dimana kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik yang lebih besar dibandingkan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa *flypaper effect* muncul saat transfer pemerintah pusat digunakan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan belanja pemerintah daerah tanpa diimbangi dengan peningkatan PAD.

Pengaruh PAD dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Aziz et al, 2000; Doi, 1998; telah melakukan studi tentang pengaruh pendapatan daerah *(local own resources revenue)* terhadap pengeluaran daerah. Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan

daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; dan Doi, 1998).

Sementara studi tentang pengaruh transfer atau *grants* dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Gamkhar & Oates, 1996). Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971). Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri *(flypaper effect).*

Studi Legrenzi & Milas (2001), menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan *(adjusted)* dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*

Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan landasan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (BD) di Kota Manado dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif antara DAU terhadap Belanja Baerah.
2. Terdapat hubungan positif antara PAD terhadap Belanja Daerah.
3. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar dari pada DAU terhadap Belanja Daerah (BD) pengaruh.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data *time series* berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado tahun 2006-2012 yang berupa realisasi Belanja Daerah (BD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data tersebut diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel terikat *(Dependent Variabel)* dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah dan variabel bebas *(Independent Variabel)* adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2012.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2012.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2006-2012.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kualitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen analisis seperti tabel dan grafik serta analisis rasio yang dapat mencerminkan uraian analisis penelitian secara teratur dan saling mendukung.
2. Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika dengan bantuan program *Eviews 5.1* dan Microsoft Excel.

Model Ekonometrika

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*). Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan.

Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing jumlah DAU dan PAD terhadap jumlah Belanja Daerah (BD) dengan persamaan sebagai berikut :

$$BD_t = a + bX_t + e \quad . \ . \ . \ . \ . \quad (.1)$$

dimana :

BD_t : Belanja Daerah
a : Konstanta
b : Koefisien regresi
X_t : DAU_t atau PAD_t
t : Periode waktu penelitian (2006-2012)
e : Error term

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah komponen-komponen pendapatan daerah tersebut secara serempak mempengaruhi Belanja Daerah. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BD_t = a + b_1 DAU_t + b_2 PAD_t + e_t \quad . \ . \ . \ . \quad (2)$$

dimana :

BD_t : Belanja Daerah
a : Konstanta
b1, b2 : Koefisien Regresi
DAU_t : Dana Alokasi Umum
PAD_t : Pendapatan Asli Daerah
t : Periode waktu penelitian (2006-2012)
e : Error term

Uji Model

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan *Jarque-Berra Test*.

Uji Multikolinearitas

Multikolineariti dapat diartikan sebagai hubungan linear diantara beberapa atau semua variabel independen dalam sebuah model regresi. Uji ini diperlukan agar CLRM (*Classical Linear Regression Model*) terpenuhi, yaitu suatu kondisi dimana terdapat hubungan yang linear sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen dalam sebuah model regresi. Multikolineariti dapat dideteksi apabila nilai R^2 yang tinggi dan uji-F yang signifikan, tetapi banyak koefisien regresi dalam uji-t yang tidak signifikan, Nachrowi (2006). Pendeteksian adanya multikolineariti dapat juga dengan cara menghitung koefisien korelasi antar variabel independen, Winarno (2007).

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersi fat BLUE maka semua residual error mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut dengan homokedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut heterokedastis. Untuk mendeteksi adanya masalah heterokedastisitas akan digunakan uji-formal, yaitu uji-White yang telah tersedia dalam program siap pakai Eviews 5.1.

Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Uji ini digunakan mengetahui adanya autokorelasi dalam model regresi. Autokorelasi adalah korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross sectional*).

Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Gujarati, 2003).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5 %.

Pengujian Terhadap *Flypaper Effect*
Flypaper efect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAU) dibandingkan menggunakan dana sendiri (PAD). Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper efect,* maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD.
Dalam regresi sederhana dan regresi berganda, koefisien regresi, nilai t-statistic, F-statistic, R^2, dan Adjusted R^2 masing-masing variabel (regresi) dibandingkan antara DAU dan PAD. Apabila efek yang ditimbulkan oleh perubahan DAU terhadap BD lebih besar daripada efek yang ditimbulkan PAD terhadap BD maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper efect, (*Dougan dan Kenyon 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Performa Keuangan Daerah Kota Manado
Untuk mengetahui performa kemampuan keuangan daerah digunakan Analisis Pendapatan dan Belanja dengan Model Analisis Rasio, Mahmudi, (2010). Pada tabel 4.1 menunjukkan performa keuangan daerah Kota Manado dilihat dari :
Pertumbuhan Analisis Pendapatan Daerah (gPD)
Rasio Kemandirian keuangan daerah (RKMDR)
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio Derajat Desentralisasi (RDD)
Analisis Pertumbuhan Belanja (gBD)
Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB (RBDPDRB)

Tabel 1
Performa Keuangan Daerah Kota ManadoTahun 2006 - 2012

	gPD	RKMDR	RKKD	RDD	gBD	RBDPDRB
2006		11,6	88,6	10,2		10,8
2007	20,9	11,5	82,7	9,5	20,8	12,2
2008	20,6	14,3	77,8	11,1	22,2	13,7
2009	-2,3	13,9	80,5	11,2	4,4	13,1
2010	4,0	17,8	75,7	13,5	0,1	12,2

2011	33,6	23,5	63,9	15,0	27,7	14,4
2012	-3,8	22,3	77,1	17,2	-1,7	13,0

Sumber : BPS Prov. Sulut (2013), data diolah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel 1 menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi fluktuasi yang tajam. Pada tahun 2011 terjadi pertumbuhan tertinggi sebesar 33,6 %, dan pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan terendah mengalami pertumbuhan yang minus yaitu sebesar - 3,8 1%. Secara keseluruhan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi trend yang negatif dan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2 %.

Rasio Kemandirian keuangan daerah

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah. Pada tabel 4.1 dapat dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Manado dari tahun 2006-2012. Secara keseluruhan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan angka terendah pada tahun 2007 sebesar 11,5 % dan teringgi pada tahun 2011 sebesar 23,5 %, dan secara rata-rata mencapai angka sebesar 16,4 %. Performa keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota Manado dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari tahun ke tahun dengan slope positif, akan tetapi relative masih belum baik masih di bawah 30 %.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dari tabel 4.1 memperlihatkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Manado. Secara keseluruhan Rasio ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan angka terendah pada tahun 2011 sebesar 63,9 % dan tertinggi pada tahun 2006 sebesar 88,6 %, dan secara rata-rata sebesar 78 %. Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Manado masih sangat bergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat, akan tetapi ketergantungan tersebut dengan trend yang semakin berkurang.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dari tabel 4.1 menunjukkan Derajat Desentralisasi Kota Manado semakin baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 hanya sebesar 10,2 % meningkat menjadi 17,2 % pada tahun 2012.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada tabel 4.1 menunjukkan pertumbuhan Belanja Daerah mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2007 sebesar 20,8 % meningkat menjadi 22,2 pada tahun 2008 dan pada tahun berikutnya tahun 2009 dan 2010 terjadi penurunan pada tahun 2011 terjadi peningkat yang tajam menjadi 27,7 %. Selanjutnya pada tahun 2012 kembali terjadi penurunan yang tajam menjadi minus, hanya sebesar – 1,7 %. Secara rata-rata terjadi pertumbuhan sebesar 12,2 % dan memiliki trend yang negatif yang mengindikasikan terjadinya penurunan dalam pertumbuhan belanja daerah.

Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

Rasio ini merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah.

Semakin rendah rasio ini maka belanja daerah semakin produktif dan efektif. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 4.1. Dapat dilihat bahwa rasio tersebut dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2006 sebesar 10,8 % dan pada tahun tahun selanjutnya terjadi peningkatan, pada tahun 2010 terjadi penurunan dari 13,1 % pada tahun 2009 menjadi 12,2 %. Kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 14,4 % dan selanjutnya pada tahu 2012 menurun menjadi 13,0 %. Rasio ini menunjukkan terjadi slope yang positf. Performa keuangan daerah tersebut menunjukkan bahwa terjadi semakin kurang produktif dan efisien.

Analisis Model Ekonometrik

Analisis Hasil Regresi

Regresi Sederhana: Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah (BD)

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap BD yaitu koefisien sebesar 1,28 dan signifikan pada α 1 %, dengan Koefisien Determinan 0.88. Hasil regresi tersebut ditunjukkan pada tabel .2.

Tabel 2
Pengaruh DAU Terhadap BD

LBD =	- 6.996425 +	1.278416 LDAU ***
Std. Error	5.7255537	0.213781
t-Statistic	-1.221965	5.980025
R^2 =	0.877333	
Adjusted R^2 =	0.877333	

Sumber : Output Eviews

Keterangan : ** * (signifikan pada α = 1 %),

Regresi Sederhana: Pengaruh PAD Terhadap BD

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap BD yaitu koefisien sebesar 0,53 dan signifikan pada α 1%, dengan Koefisien Determinan 0.93. Hasil regresi tersebut ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel.3
Pengaruh PAD Terhadap BD

BD =	13.96342 *** +	0.528558 PAD ***
Std. Error	1.687214	0.067152
t-Statistic	8.276023	7.871090
R^2 =	0.925322	
Adjusted R^2 =	0.910386	

Sumber : Output Eviews

Keterangan : *** (signifikan pada α = 1 %)

Analisis Regresi Berganda: Pengaruh DAU dan PAD terhadap BD

Pengujian atas pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap Bel.anja Daerah dan untuk

mengetahui yang mana yang lebih dominan diantara kedua variabel tersebut. Hasil regresi tersebut ditunjukkan pada tabel 4.4

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap BD dengan koefisien sebesar 0.398321 signifikan pada α = 10 %, dan DAU berpengaruh positif terhadap BD dengan koefisien sebesar 0.341704 akan tetapi tidak signifikan. Koefisien Determinan 0.931821 dan koefisien Determinan Penyesuaian 0.897731. Durbin Watson Statistik sebesar 1.544004, dan F statistic sebesar 27.33452 dan signifikan pada α = 1%

Tabel 4
Pengaruh DAU & PAD Terhadap BD

LBD =	8.083805 +	0.341704 LDAU +	0.398321 LPAD *
Std. Error	0.764914	0.529417	0.160513
t-Statistic	0.764914	0.645434	2.481554

R^2 = 0.931821
Adjusted R^2 = 0.897731
D-W stat = 1.544004
F stat = 27.33452 ***

Sumber : Output Eviews
Keterangan : *** (signifikan pada α = 1 %)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan Jarque-Berra Test (*JB Test*) ditunjukkan pada gambar 4.4. Hasil menunjukkan bahwa Model Belanja Daerah dilihat dari *Jarque-Bera normality statistic* adalah sebesar 0.08 lebih kecil dari nilai 2. Selain itu ditunjukkan juga oleh angka *Probability* sebesar 0.96 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini mebuktikan bahwa data telah berdistribusi normal (Pratomo, 2007).

Gambar 3

Uji Normalitas (*Jarque-Bera*

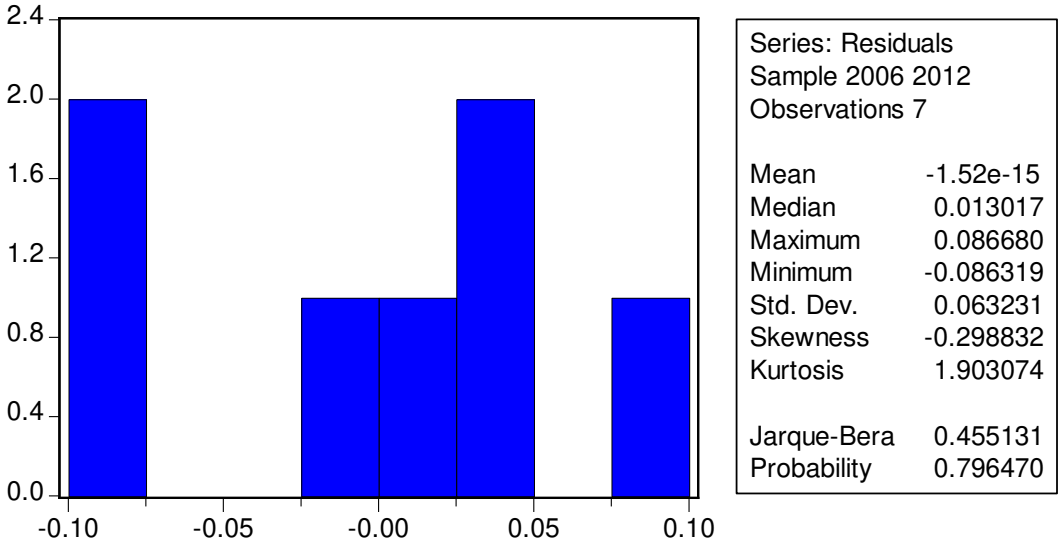

***Test*)**

Sumber : Output Eviews

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji White menunjukkan bahwa Model Belanja Daerah tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal tersebut dibuktikan dari hasil Uji White, dimana angka probabilita dari Obs*R-Squared pada hasil estimasi adalah lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.490916. Tabel 5. Menunjukkan hasil pengujian dengan Uji White.

Tabel 5
Hasil Uji White

F-statistic	0.476297	**Prob. F(5,5)**	0.761992
Obs*R-squared	3.415024	**Prob-square(5). Chi**	0.490916

Sumber : Output Eviews

Uji Multikolinieritas

Yang dimaksud dengan multikolinearitas adalah adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas yang terdapat dalam suatu model. Widarjono (2006), Ciri-ciri adanya multikolinearitas dapat ditunjukkan oleh beberapa faktor, namun yang paling mendukung penjelasan adanya gejala multikolinearitas dalam model adalah jika dalam hasil regresi diperoleh nilai R^2 yang tinggi (mendekati 1), tetapi tidak satupun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir penting secara statistik (melalui uji F dan uji t). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat digunakan melalui cara uji korelasi yaitu *Coefficient Correlation Matrix*, (Pratomo, 2007). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11 tabel Coefficient *Correlation Matrix*.

Tabel 6 menunjukkan bahwa antara variabel PAD, DAU dan BD menunjukkan adanya nilai koefisiennya yang lebih besar 0.80, atau semuanya lebih besar dari nilai 0.80. Hal ini berati kemungkinan adanya multikolinearitas, Gujarati (2003).

Tabel 6 *Coefficient Correlation Matrix*

	LPAD	**LDAU**	**LBD**
LPAD	1	0.946737557886928	0.961936548655639

LDAU	0.946737557886928	1	0.936660457800547
LBD	0.961936548655639	0.936660457800547	1

Sumber : Output Eviews 5.1

Uji Otokorelasi

Penaksiran model regresi linier normal klasik mengandung asumsi bahwa tidak terdapat korelasi serial diantara *disturbance term* atau autokorelasi, untuk menguji apakah dalam model tersebut terdapat autokorelasi dapat diuji dengan Uji Lagrange Multiplier (LM Test). Dari tabel 4.7 diperoleh hasil LM Test menunjukkan bahwa nilai probability lebih tinggi dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat otokorelasi dari hasil estimasi tersebut.

Tabel 7
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.025800	Prob. F(2,2)	0.974849
Obs*R-squared	0.176055	Prob. Chi-Square(2)	0.915735

Sumber : Output Eviews 5.1

Pengujian Terhadap *Flypaper Effect*

Flypaper efect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAU) dibandingkan menggunakan dana sendiri (PAD). Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper efect,* maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD.

Dalam regresi sederhana, koefisien regresi, nilai t-statistic, F-statistic, R^2, dan Adjusted R^2 masing-masing variabel (regresi) dibandingkan antara DAU dan PAD. Apabila efek yang ditimbulkan oleh perubahan DAU terhadap BD lebih besar daripada efek yang ditimbulkan PAD terhadap BD maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper efect.*

Perbandingan masing-masing variabel (regresi) untuk regresi sederhana dengan dapat dilihat dalam tabel 8. Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai t-statistic, F-statistic, R, R^2, dan adjusted R^2 masing-masing variabel (regresi) bahwa PAD lebih besar daripada DAU hal ini menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap prediksi Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah (BD), yang berarti juga bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD. ditolak. Hal ini berarti bahwa keberadaan Flypaper Effect tidak terbukti.

Dari hasil regresi berganda dapat dilihat bahwa DAU dan PAD benar-benar memberikan pengaruh terhadap BD. Tabel 5 menunjukkan Dari hasil perbandingan yang menunjukkan bahwa nilai t-statistic, F-statistic, R^2, dan adjusted R^2 masing-masing variabel (regresi) dari PAD yang lebih besar dari BD. Ditunjukkan juga bahwa pengaruh PAD terhadap BD lebih kecil daripada pengaruh DAU terhadap BD, akan tetapi pengaruh PAD signifikan pada alpha 10 %, sedangkan DAU tidak signifikan. Keseluruhan hal tersebut memberikan bukti tentang tidak adanya keberadaan *flypaper efect.*

Tabel 8
Perbandingan Pengaruh DAU dengan PAD terhadap Prediksi BD

A (DAU)	B (PAD)	KET
BD = -6.996425 + 1.278416 DAU	BD =13.96342 + 0.528558 PAD	
Sig = 0.0019 t-statistic = 5.980025	Sig = 0.0005 t-statistic = 7.871090	A < B
F-statistic = 35.76070	F-statistic = 61.95405	A < B

R (R2) = (0.877333)	R (R2) = (0.925322)	A < B
Adjusted- R2 = 0.877333	Adjusted- R2= 0.910386	A < B

Sumber : Output Eviews diolah

Dengan demikian dari estimasi regresi sederhana dan regresi berganda menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2002-2012 membuktikan bahwa tidak adanya fenomena *Flypaper Effect*. Hal ini berarti Pemerintah Kota Manado dalam memprediksi Belanja Daerahnya (BD) lebih mengutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah (BD) Kota Manado. Kesimpulan dan saran dibuat berdasarkan teori-teori dan pembuktian baik secara empiris dan ekonomi.

Kesimpulan

Performa keuangan daerah secara keseluruhan selang periode tahun anggaran 2006-2012 mengalami perkembangan yang membaik. Hal ini ditunjukkan rasio-rasio dan analisis sebagai berikut :

Pertumbuhan pendapatan daerah terjadi fluktuasi dan berkembang dengan trend negatif;

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota Manado dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari tahun ke tahun; Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Manado masih sangat bergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat dengan tingkat ketergantungan yang semakin berkurang; Derajat Desentralisasi Kota Manado menunjukkan trend yang positif. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dilihat dari peningkatan Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik.

Pertumbuhan Belanja mengalami pertumbuhan dengan trend negatif; Produktivitas dan efektivitas belanja daerah menunjukkan semakin kurang produktif dan efisien.

Hasil estimasi Regresi Sederhana dan Berganda membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Pemerintah Daerah (BD), sedangkan DAU juga berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Manado tidak terjadi Flypaper Effect. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Kota Manado dalam memprediksi Belanja Daerahnya (BD) lebih mengutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

Performa keuangan daerah harus selalu ditingkatkan kinerjanya untuk semakin meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik, dan juga sebagai stimulus penggerak/pemacu mendorong aktivitas ekonomi keseluruhan.

Mengingat bahwa dalam memprediksi Belanja Daerahnya (BD) lebih mengutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang diproksi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perolehan sumber-sumber PAD harus lebih diintensifkan.

Dalam meningkatkan perolehan PAD Kota Manado haruslah menghindari terjadi kontra produktif yaitu semakin banyak dan ragam berbagai pungutan-pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga akan membebani aktivitas ekonomi daerah dan menimbulkan penurunan daya saing ekonomi.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu disaran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya periode waktu/tahun penelitian yang digunakan ditambah sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendukung, sehingga nantinya diharapkan kesimpulan yang diperoleh lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habubullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. 2000. *The causal relationship between tax revenues and Government spending in Malaysia. University Putra Malaysia, working Paper.*

Bradford, D. & W. Oates. (1971a). *The analysis of revenue sharing in a new approach to collective fiscal decision. Quarterly Journal of Economics* 85 (3)

Chang, Tsangyao & Yuan Hong Ho. 2002. *Tax or spend, what cause what: Taiwan's experience . International Journal of Business and economics* 1 (2): 157-165.

Doi, Takero. (1998). *Is Japanese local finance really centralized? From viewpoint of the revenue-expenditurenexus. University of Tokyo, Working Paper.*

Emelia, 2006. Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Gamkhar, Shama & Wallace Oates. 1996. *Asymetries in response to increase And decrease in intergovernmental grants: Some empirical findings. National Tax Journal* 49 (4):501-512.

Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics, Fourth Edition*., Mcgraw Hill.

Halim, Abdul & Sukriy, Abdullah., 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: Jurnal konomi STEI No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.

Handayani Atiah. 2009. Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*Tax Efort*) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi Tidak Dipublikasikan, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.

Jaya WK, 2002, Analisa Keuangan Daerah : Pendekatan Makro, Model Program PMSS ES, Kerjasama Dit jen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis UGM.

Kuncoro Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta

Legrenzi. Gabriella & Costas Milas. 2001. *Non-linier and asymetrics adjustment in the local revenue–expenditure models: some evidence from the Italian municipalities. University of Milan. Working paper.*

Mahmudi., 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Maimunah Mutiara. 2006. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Nagathan, dan KJ Sivagnanan. 1999. *Federal Transfer and Tax Effort of States in India.Indian Economic Journal.*

Nawatmi, Sri, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Jurnal Ekonomi dan Bisinis Vol 13 No 2, September, 2006.

Oates, Wallace. 1999. *An essay of fiscal federalism. Journal of Economics Literature* 37: 1120-1149.

Prakosa, Kesit Bambang, 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah ; Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, JAAI Vol 08 No 2.

Purnomo, Bayu, 2011 *Flypaper Effect* pada Pengaruh Transfer Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tahun 2007-2010.

Rosen, H.S., (2002), *Public Finance*, edisi keenam, Mc-Graw Hill Book. Co., New York.

Rusydi Bahrul, 2010, Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008), Skripsi Tidak Dipublikasikan. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

Shah, A., (1994), *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies, Policy and Paper Series*, No. 23, The World Bank, Washington, DC.

Suparmoko,. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Penerbit Andi,Yogyakarta.

Suparmoko, 2011. Keuangan Negara, Edisi Keenam, BPFE, Yogyakarta.

Suranta, Sri dan Muhammad Syafiqurrahman, 2005. Eksistensi Pajak Daerah melalui Pajak Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Surakarta, *Empirika Vol 18 No 1,* Juni.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Warsito, Kawedar, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit UNDIP: Semarang.